

Effectiveness of Village Information Systems in the Larangan Village Government

Efektivitas Sistem Informasi Desa Di Pemerintahan Desa Larangan

Kandina Bahagia¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: Hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *Objective: This study aims to analyse and describe the effectiveness of the Village Information System (SIS) in supporting governance and public services in the Larangan Village Administration. Method: A qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews and direct observation to capture the performance of the SIS in practice. Results: Findings indicate that the effectiveness of the SID can be explained through three main approaches: the resource approach, where the quality of human resource management significantly influences system performance, although challenges remain for elderly users with limited digital literacy; the process approach, which highlights community satisfaction as a measure of service quality and suitability to public needs; and the goal approach, which emphasises the achievement of organisational goals through transparency, flexibility, and community participation in village development. Uniqueness: This study provides a comprehensive evaluation of SID effectiveness by integrating three theoretical approaches to organisational effectiveness, offering practical insights into digital governance at the village level, and highlighting the importance of inclusivity and adaptability in an era of technological transformation.*

Keywords - effectiveness, village information system, human resources

Abstrak. *Tujuan: Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam mendukung tata kelola dan layanan publik di Pemerintahan Desa Larangan. Metode: Pendekatan kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung untuk menangkap kinerja SID dalam praktik. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa efektivitas SID dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama: pendekatan sumber, di mana kualitas manajemen sumber daya manusia secara signifikan mempengaruhi kinerja sistem, meskipun masih ada tantangan bagi pengguna lanjut usia dengan literasi digital yang terbatas; pendekatan proses, yang menyoroti kepuasan masyarakat sebagai ukuran kualitas layanan dan kesesuaian dengan kebutuhan publik; dan pendekatan tujuan, yang menekankan pencapaian tujuan organisasi melalui transparansi, fleksibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keunikan: Studi ini memberikan evaluasi komprehensif tentang efektivitas SID dengan mengintegrasikan tiga pendekatan teoretis tentang efektivitas organisasi, memberikan wawasan praktis tentang tata kelola digital di tingkat desa, dan menyoroti pentingnya inklusivitas dan adaptabilitas di era transformasi teknologi.*

Kata Kunci - Efektivitas; Sistem Informasi Desa, Sumber Daya Manusia

I. PENDAHULUAN

Sistem informasi adalah kombinasi dari berbagai komponen seperti manusia, komputer, dan teknologi informasi, yang bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi guna mencapai tujuan tertentu [1]. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kumpulan elemen yang saling terhubung untuk mengintegrasikan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Singkatnya, sistem informasi adalah elemen-elemen yang berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian operasional dalam suatu organisasi [2]. Saat ini, teknologi informasi merupakan dukungan yang sangat efektif, memudahkan orang dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi ini secara luas digunakan sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi, terutama melalui situs web [3]. Situs web memainkan peran penting karena mampu menyampaikan informasi secara efisien dan terkini, serta mudah diakses oleh orang-orang di berbagai wilayah dengan hanya menggunakan internet. Misalnya, situs web dapat digunakan untuk pemasaran, pendidikan, komunikasi, dan promosi [4]. Selain itu, situs web juga merupakan media ideal untuk memperkenalkan potensi dan keunggulan suatu produk kepada khalayak luas. Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang yang memiliki kesatuan hukum dan merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah kepala kecamatan, meskipun mereka tidak dapat mengelola rumah tangga mereka sendiri [5]. Informasi pengetahuan di desa-desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa di Indonesia diwajibkan memiliki situs web atau sistem informasi untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi warganya. Namun, dalam pelaksanaannya, desa- desa menghadapi kendala terkait penggunaan nama domain [6]. Nama domain go.id, yang biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah, tidak dapat digunakan oleh desa-desa. Akibatnya, banyak desa terpaksa menggunakan domain .or.id, yang sebenarnya diperuntukkan bagi organisasi nirlaba. Ini menjadi masalah, mengingat desa-desa adalah unit pemerintahan, bukan organisasi nirlaba [7]. Kondisi ini memicu munculnya inisiatif dari berbagai desa, seperti Gerakan Pembangunan Desa (GDM), yang mengusulkan domain khusus untuk desa-desa. Harapannya, domain khusus ini dapat memberikan identitas yang lebih jelas bagi situs web desa, serta memudahkan masyarakat untuk menemukan informasi terkait desa mereka [8].

Sistem Informasi Desa (SID) memegang peranan krusial dalam mentransformasi birokrasi tingkat desa melalui digitalisasi administrasi yang lebih ramping dan efisien. Selain mempercepat durasi pelayanan publik, platform ini menjadi instrumen utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan integrasi data kependudukan yang presisi, SID meminimalisir risiko kesalahan input manual sekaligus memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran. Lebih jauh lagi, ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh warga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan desa. Pada akhirnya, SID berfungsi sebagai fondasi kuat bagi perangkat desa untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih strategis, inklusif, dan sepenuhnya berbasis pada data riil di lapangan (evidence-based policy). Manfaat SID bagi masyarakat dan Desa Larangan: Pertama, melalui artikel desa yang diterbitkan di SID, masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang berlangsung di Desa Larangan. Kedua, SID juga menyediakan informasi terkini mengenai perkembangan penduduk, batas wilayah, tingkat pendidikan, dan aspek lain dari Desa Larangan. Ketiga, SID berfungsi sebagai acuan utama bagi Kepala Desa dalam pembuatan kebijakan, karena menyediakan data dan informasi rinci tentang profil Desa Larangan. Masyarakat dapat memperoleh data demografis komprehensif tentang populasi, termasuk usia, jenis kelamin, dan mata pencaharian. Informasi tentang batas administratif Desa Larangan juga tersedia, memberikan kejelasan spasial. Selain itu, SID menampilkan data terkait tingkat pendidikan masyarakat, fasilitas pendidikan yang ada, serta informasi penting lainnya terkait pembangunan desa. Ketersediaan data ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan desa yang lebih terarah dan efektif. Dalam hal dukungan dari pemerintah Desa Larangan, admin SID dan operator desa secara rutin memperbarui data setiap tahun dengan bantuan operator regional [9], [10].

Sejak diluncurkan, Sistem Informasi Desa (SID) pada tahun 2021 telah membawa transparansi yang signifikan bagi masyarakat Desa Larangan. Kini, warga desa dapat dengan mudah mengetahui segala hal yang terjadi di desa, termasuk berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan [11]. Berkat SID, informasi mengenai kegiatan desa didokumentasikan dan dipublikasikan, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa. SID juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait kegiatan di masa depan. Tidak hanya sebagai sumber informasi, SID juga berfungsi sebagai forum partisipasi aktif masyarakat. Warga bahkan dapat berkontribusi secara langsung dengan mengunggah kegiatan di wilayah masing- masing ke dalam SID. Hal ini menunjukkan bahwa SID tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan mereka, mengidentifikasi masalah, dan mengusulkan solusi. Untuk memfasilitasi hal ini, setiap RT dan RW diberikan akses login untuk mengunggah data kegiatan di wilayah masing-masing.

Gambar 1. Halaman Di Layar Utama Website Desa Larangan

Type your title in here (8 pt)



Sumber; Website resmi Pemerintah Desa Larangan (2025)

Portal digital ini merupakan beranda utama dari situs web pemerintahan Desa Larangan yang terletak di wilayah Kecamatan Candi, Sidoarjo. Melalui tampilan antarmuka website ini menyajikan informasi terkini yang dilengkapi dengan penunjuk waktu otomatis bagi pengunjung. Struktur navigasi yang tersedia mempermudah masyarakat untuk mengeksplorasi profil wilayah, struktur organisasi pemerintahan, hingga data desa secara transparan. Visualisasi utama pada halaman ini menonjolkan keindahan alam pegunungan, sekaligus menyediakan akses cepat menuju fitur layanan publik dan informasi administratif desa lainnya.

Observasi di lapangan menyajikan data tentang populasi Desa Larangan dikelompokkan berdasarkan wilayah;

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Larangan

No	Wilayah/ Ketua	RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
1	Dusun Pemukiman Larangan Barat	01	3	150	240	234	474
2	Dusun Pemukiman Larangan Selatan	02	5	330	525	524	1049
3	Dusun Pemukiman Larangan Utara	03	5	219	340	339	679
4	Dusun Pemukiman Minggir Timur	04	3	254	399	409	808
5	Dusun Perumahan Taman Jenggala Utara	05	4	151	235	242	477
6	Dusun Perumahan Taman Jenggala Tengah	06	5	141	226	221	447
7	Dusun Perumahan Taman Jenggala Selatan	07	5	176	244	281	525
8	Dusun Perumahan Larangan Mega Asri	08	9	242	428	446	874
9	Dusun Perumahan Mutiara Citra Graha	09	8	254	453	450	903

Sumber; Situs web resmi Pemerintah Desa Larangan (2024) [12]

Data ini menunjukkan bahwa Desa Larangan dibagi menjadi 9 wilayah RW. Setiap RW berfungsi sebagai unit organisasi yang mengawasi sejumlah RT, berdasarkan wilayah perumahan [13]. Setiap RW juga menampung beberapa rumah tangga, yang mencerminkan keragaman dan interaksi sosial di dalam komunitas. Pembentukan kelompok-kelompok ini bertujuan untuk menyederhanakan urusan administratif dan layanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa [14]. Selain itu, data ini juga merinci jumlah penduduk di setiap RW, dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki (L) dan perempuan (P). Informasi ini sangat penting untuk memahami komposisi demografis Desa Larangan, yang dapat digunakan untuk merancang strategi pengembangan dan penyediaan layanan publik yang lebih terarah. Dengan mengetahui jumlah rumah tangga dan individu di setiap RT dan RW, pemerintah desa dapat lebih mudah merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga setempat [15]. Melalui perspektif Martin dan Lubis, data kependudukan Desa Larangan yang mencakup sembilan wilayah dusun merupakan sumber utama dalam ekosistem digital desa. Informasi ini kemudian dikelola melalui proses digitalisasi pada platform website desa untuk memastikan akurasi dan kemudahan akses informasi bagi perangkat maupun warga. Hasil akhirnya, sistem ini mencapai sasaran strategis berupa efisiensi birokrasi, di mana data statistik tersebut bertransformasi menjadi landasan objektif dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang lebih responsif bagi masyarakat Sidoarjo.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hazira Maharani, Maria Ulfa, 2022) [16] dengan judul “Sistem Informasi Desa dalam Peningkatan Layanan Publik Berbasis Web”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Desa dengan sistem komputerisasi dapat menyediakan informasi laporan dan layanan administratif secara lebih efektif, sehingga pejabat desa dapat melayani masyarakat dengan lebih mudah. Sistem Informasi Desa berbasis web mobile yang dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan layanan, terbukti bahwa layanan yang disediakan oleh Pemerintah Desa Lesung Batu efektif, cepat, dan akurat. Selain itu, terdapat juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rosita Dwi Novianti dan Isna Fitria Agustina, 2024) [17] dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam Meningkatkan Layanan Administrasi”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengoperasikan SID telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dan sejalan dengan visi pemerintah desa. Namun, masih terdapat tantangan signifikan, terutama terkait kemampuan teknologi warga lanjut usia. Hal ini menyoroti pentingnya upaya sosialisasi yang lebih inklusif dari pemerintah desa untuk memastikan sistem ini dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, terdapat juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Elvin Nury Khirdany dan Zulviar Anas, 2024) [18] Dengan judul “Efektivitas Penggunaan Situs Web Desa sebagai Layanan Informasi bagi Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas penggunaan situs web Desa Dasok dalam menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat. Subjek penelitian adalah pejabat desa dan warga Desa Dasok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) kualitas sistem mudah digunakan dan informasi di situs web sesuai dengan kondisi sebenarnya; (b) kepuasan pengguna terhadap sistem belum sepenuhnya memuaskan dan kurangnya sosialisasi yang merata kepada masyarakat di desa; (c) kualitas informasi mudah dipahami, kelengkapan sistem belum terpenuhi, keamanan cukup baik, dan akurasi yang baik [19].

Pengamatan lapangan mengungkapkan beberapa masalah terkait efektivitas sistem informasi desa berbasis web di Desa Larangan: Pertama, terdapat ketidakmerataan dalam kemampuan sumber daya manusia (SDM) di kalangan pejabat desa. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan usia yang beragam menyebabkan perbedaan dalam penguasaan teknologi informasi dan kemampuan mengoperasikan SID. Beberapa pejabat desa mahir, sementara yang lain mungkin masih kesulitan dengan dasar-dasar komputer, tergantung pada individu.

Tabel 2. SDM Pengurus SID Di Desa Larangan

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir

Type your title in here (8 pt)

1	Kaur Perencanaan	D3
2	Kasun Larangan Timur	SLTA/Sederajat
3	Staf Umum	SLTA/Sederajat

Sumber: Pemerintah Desa Larangan

Data diatas menjelaskan bahwa, struktur informasi pada Desa Larangan merupakan integrasi antara potensi wilayah dan teknologi digital. Berdasarkan perspektif Martin dan Lubis, data demografi yang mencakup sembilan area RW merupakan sumber vital yang dikelola oleh tenaga SDM berkompeten dari jajaran perangkat desa. Seluruh data mentah tersebut melewati proses digitalisasi melalui portal web resmi desa guna menjamin akurasi dan kemudahan akses bagi publik. Hasil akhir atau sasaran dari sistem ini adalah terciptanya pelayanan publik yang responsif serta tata kelola pemerintahan desa yang berbasis pada data riil, sehingga setiap kebijakan pembangunan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara objektif kepada masyarakat. Kedua, meskipun SID memiliki fitur yang sangat lengkap, seperti layanan korespondensi online, data tanah, aset, dan data kemiskinan, fitur-fitur ini belum dimaksimalkan. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai aplikasi serupa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat, seperti Sipraja, Prodeskel, Sipades, Siks-NG, dan lainnya. Keberadaan berbagai aplikasi dengan fungsi yang tumpang tindih membingungkan pejabat desa dan masyarakat, serta menyebabkan duplikasi pekerjaan [10].

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dijelaskan, penulis bermaksud menganalisis hasil studi berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Web di Desa Larangan” melalui perspektif teori Martin dan Lubis yang menitikberatkan pada tiga pilar utama. Pertama, dari sisi sumber daya, ditemukan bahwa meski dikelola oleh perangkat desa yang kompeten, aksesibilitas bagi warga lansia masih terhambat oleh kesenjangan digital. Selain itu, terdapat kendala psikologis di mana masyarakat masih merasa segan untuk berkontribusi aktif dalam mengisi konten artikel pada website. Kedua, melalui pendekatan proses, efektivitas sistem diuji berdasarkan mutu layanan publik yang tersaji dalam fitur-fitur portal. Terakhir, pendekatan tujuan melihat sejauh mana ketersediaan data demografi dari 9 RW tersebut dapat mendorong keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa secara komprehensif."

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif sendiri merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan masalah yang terjadi saat ini atau sedang berlangsung. Tujuan utamanya adalah menggambarkan peristiwa sebagaimana adanya selama periode penelitian. Sesuai dengan itu, [12] menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena yang terkait dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan aspek lainnya. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan secara naratif, terutama melalui wawancara. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang akan menjadi fokus utama dalam pengumpulan data.

Fokus penelitian ini menggunakan konsep teoretis dari [13] yang mengevaluasi efektivitas sistem informasi. Studi ini menggunakan teori Martin dan Lubis, yang mencakup tiga indikator utama, yaitu: 1) Pendekatan Sumber (evaluasi kinerja operator), 2) Pendekatan Proses (kualitas layanan), dan 3) Pendekatan Tujuan (ketepatan target program). Teknik pengumpulan data yang digunakan dikumpulkan melalui tiga metode utama: pengamatan langsung, wawancara dengan informan kunci, dan studi literatur. Sampling purposif adalah metode pemilihan informan berdasarkan kriteria spesifik yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian. Peserta yang dipilih idealnya memiliki pemahaman komprehensif dan pengalaman langsung terhadap sistem informasi desa, guna menyediakan data yang valid dan mendalam. Menurut Sugiyono, sampling purposif adalah metode pemilihan sampel berdasarkan tujuan spesifik, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami informasi yang dibutuhkan. Proses penentuan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan kebutuhan penelitian, di mana informan dalam penelitian ini adalah kepala perencanaan di Desa Larangan dan masyarakat. Pengamatan langsung dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem beroperasi, sementara wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam dari pihak yang terlibat [14].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas memiliki dua dimensi, yaitu teoretis dan praktis, yang menekankan pada analisis yang menyeluruh dan mendalam dalam sebuah penelitian. Sebagai faktor penentu keberhasilan suatu tindakan, efektivitas berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana target yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau institusi tercapai. Hal ini bertujuan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan yang telah diraih. Sejalan dengan pemikiran Etzioni dan rekan-rekannya (1985:54-55) dalam karya mereka, Organisasi Modern, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya (seperti yang dikutip dalam Gibson et al., 2000). Penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung dengan informan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pendekatan Sumber:

Pengukuran efektivitas organisasi dapat dilakukan dengan mengevaluasi kapasitasnya dalam mengamankan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan targetnya. Metode ini menekankan pada bagaimana organisasi memperoleh dan memberdayakan input dari lingkungan eksternal demi menghasilkan output yang diharapkan. Menurut Martin dan Lubis (1987) pendekatan sumber adalah sumber daya manusia yang mengelola SID. Kinerja operator dan staf sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem. Namun, tantangan muncul ketika masyarakat, terutama yang berusia lanjut, kesulitan mengakses teknologi. Pendekatan ini mengukur efektivitas dari input dengan mengutamakan keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan, baik fisik maupun nonfisik, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Pengelolaan sumber daya disini adalah perangkat desa, Rw, dan masyarakat yang ditunjuk oleh Rw-setempat. InsyaAllah di tahun 2025 ini kita ada panambah sumber daya yaitu dari Rt, tetapi masih dibahas dengan BPD, kalau memang iya deal gitu mungkin nanti pendatannya biasanya dilakukan oleh masyarakat ini akan di hendel oleh Rt setempat jadi lebih update kalau ada warga masuk atau keluar langsung dari Rt tau, supaya tidak mununggu waktu pendataan.”

Kualitas operasional sebuah sistem informasi sangat bergantung pada kapasitas pengelolanya. Tabel di bawah ini merinci latar belakang pendidikan formal dari perangkat desa yang bertanggung jawab atas keberlangsungan SID di Desa Larangan:

Tabel 3. Pengelola Sumber Daya

No	Tugas Utama	Manajer/ Pejabat yang Bertanggung Jawab
1	Konten Berita	Kepala Perencanaan. Sekertaris Desa, dan Staf Desa
2	Pembaruan Data Penduduk	RT/ RW
3	Pengelolaan atau Pemantauan Aktivitas SID	Sekertaris Desa dan Staf Desa
4	Pengawas Data	Kepala Perencanaan

Sumber: Informasi dari Pemerintah Desa Larangan [18]

Data diatas menunjukkan bahwa Desa Larangan memiliki basis demografi yang terdokumentasi dengan baik di 9 wilayah RW, baik di area pemukiman maupun perumahan. Pengelolaan basis data ini dijalankan oleh pengurus SID yang memiliki latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SLTA hingga Diploma. Dalam praktiknya, keberlangsungan sistem ini didukung oleh pembagian tugas yang terstruktur, di mana pembaruan data mengandalkan peran aktif pengurus RT/RW, sementara pengawasan dan pengelolaan konten berada di bawah kendali perangkat desa seperti Kepala Perencanaan dan Sekretaris Desa.

Sumber daya alam (SDM) berarti sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi dimana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan SDA apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yng berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar disbanding permintaannya sehingga ia dianggap tidak bernilai. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan rehabilitasi SDA merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Selain hal tersebut, kebijakan pengelolaan SDA juga dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengembangkan ekonomi kerakyatan berupa pembagian hasil bagi daerah-daerah secara lebih proporsional, serta menciptakan keseimbangan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, issue utama mengenai pengelolaan SDA di Daerah adalah bagaimana melahirkan kebijakan pengelolaan SDA sehingga dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian suatu Daerah secara optimal. Adapun informasi dari bapak Achmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo. Terkait kemampuan operator dari setiap desa.

“terkait kemampuan apa saja yang ada oleh operator ataupun teman-teman admin Desa ini? jadi sebelum saya jelas, saya ingin cerita bahwa di Desa Larangan ini ada yang namanya SID (Sistem Informasi Desa Larangan), nah saya punya tim operator desa yang terdiri dari 3 orang. 3 orang ini 1. Ketuanya Bu Astrid (Kasun Larangan Barat), 2. Pak Jarwo (Kasun Larangan Timur) yang tadi 3. Mas Jhon stafnya Desa. Nah itu yang bantu saya di di Desa ini, kalau di lingkup wilayah RW per-wilayah, jadi yang di desa itu merekap hasil dari inputan RW tadi, nah terkait kemampuan apa yang harus dimiliki yang jelas teman-teman ini paling tidak bisa mengoperasikan computer dan tau paling tidak hal-hal online. Jadi untuk hal-hal yang paling penting itu adalah teman-teman atau operator Desa ataupun wilayah tau bagaimana situasi kondisi di wilayah masing-masing. Situasi itu meliputi dari penduduk misal nya pekerja penduduk itu apa, usia, pembagian wilayah, fasum, dan tanggal lahir ataupun kondisi sosial lainnya”.

Sinkronisasi antara pengelolaan sumber daya di Desa Larangan dengan teori Martin dan Lubis divalidasi oleh berbagai studi terdahulu. Riset oleh Maharani dan Ulfa (2022) serta Novianti dan Agustina (2024) sama-sama menekankan bahwa keberhasilan SID sangat bergantung pada kapabilitas organisasi dalam mengelola input SDM dan mengatasi kesenjangan digital di masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian Khirdany dan Anas (2024) mengingatkan bahwa efektivitas situs web sebagai kanal informasi hanya akan optimal jika hambatan partisipasi warga, seperti rasa segan dalam berkontribusi konten, dapat diatasi melalui pemberdayaan sumber daya yang lebih inklusif.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Martin dan Lubis (1987) mengenai pendekatan sumber dari hasil pengelolaan sumber daya sudah sesuai karena menilai kemampuan organisasi dalam mengamankan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan. Martin dan Lubis (1987) menyatakan bahwa kemampuan organisasi dalam memperoleh dan memberdayakan masukan dari lingkungan eksternal, yang sesuai dengan gagasan bahwa efektivitas diukur dari kemampuan organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan, baik material maupun non-material. Berdasarkan hasil, penelitian pengelolaan sumber daya di Desa Larangan juga mencerminkan pendekatan ini, di mana staf desa dan warga berperan dalam pengumpulan dan pemeliharaan data. Hal ini menunjukkan bagaimana organisasi lokal berusaha untuk memanfaatkan potensi manusia secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka, termasuk dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID). Kendala akses teknologi bagi masyarakat, terutama lansia, juga relevan, karena hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan sistem yang dijalankan oleh organisasi. Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman yang tepat mengenai pendekatan sumber daya dalam konteks efektivitas organisasi menurut Martin dan Lubis.

Pendekatan Proses:

Dalam manajemen SDM, Process Approach atau Pendekatan Proses merupakan sebuah metode yang menitikberatkan pada alur kerja yang terstruktur dan prosedural. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai proses internal organisasi demi tercapainya efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam mewujudkan tujuan. Menurut Martin dan Lubis (1987) Pendekatan Proses (Process Approach): Mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Efektivitas diukur dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima. Bersumber dari hasil informasi melalui wawancara dengan bapak Achmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo bahwasannya pelayanan yang diberikan pemerintah dan desa kepada masyarakat sebagai berikut.

“terkait pengelolaan untuk urutannya terkait pendataan itu, jadi staf kita kan ada pendataan SID saya sebagai kaur perencanaan disini berkoordinasi dengan BPD terlebih dahulu, ini dalam arti saya ke BPD untuk menjelaskan, setelah saya ke BPD koordinasi saya menginformasikan kepada bu sekdes, bu saya masih dalam BPD nanti kegiatannya jelaskan pada tanggal sekian dan bulan sekian misal nya, terus bu sekdes diklarifikasi, nanti bu sekdes konfirmasi ke pak kades, kalau sudah nanti pak kades konfirmasi ke bu sekdes lalu ke saya lagi. Nanti saya dan bu sekdes ke BPD itu rapat interen dulu persiapannya, persiapannya dalam arti gini BPD di matangkan lagi untuk jadwal nya, terus nanti kalau misal kita dianggarkan SID satu RW yang input 3 orang misal nya, tapi karena itu mutahiran biasanya RW Cuma dua orang cukup berarti satu RW kita ambil masing-masing dua orang, setelah rapat itu uturus kita tentukan waktunya berapa lamanya, nah itu tadi sambil BPD sepakati buat berita acara kapan mau di musdes pembentukan tim, setelah sudah disepakati Bersama dengan BPD kita informasikan ke Pak Kades, setelah dari pak kades, akhirnya pak kades juga ikut ke BPD. Sudah tiga bulan jalan selesai tidak selesai kita upayakan

semaksimal mungkin dalam arti , kan gk mungkin ya kalau suda pendataan waktunya habis mungkin bulan November , kan desember masih ada biasanya juga ada penduduk yang keluar masuk, meninggal , dan lahir , jadi kita anggap itu sudah maksimal karena gak mungkin kita masih di akhir tahun itu masih berputar dengan pendataan, karena APBD harus diselesaikan seminggu sebelum tutup tahun anggaran desanya “.

Kualitas pelayanan tercipta ketika ada interaksi positif antara mereka yang menerima dan mereka yang memberikan layanan, baik itu berupa jasa atau bantuan langsung. Jika layanan yang diterima sesuai dengan harapan, maka layanan tersebut dianggap berkualitas. Sebaliknya, jika tidak sesuai harapan, maka kualitasnya rendah. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari bagaimana petugas layanan bertindak sesuai aturan. Misalnya, bersikap ramah dan membantu pelanggan yang kesulitan. Dalam konteks Sistem Informasi Desa (SID), petugas harus memiliki kemampuan teknis yang baik dalam mengoperasikan komputer. Selain itu, mereka juga harus responsif dalam memberikan informasi dan menanggapi masukan dari masyarakat. Mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Efektivitas diukur dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima. Bersumber dari hasil informasi melalui wawancara dengan bapak Achmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo bahwasannya pelayanan yang diberikan pemerintah dan desa kepada masyarakat sebagai berikut.

“SID ini mencakup hampir semua hal di Desa. SID ini sebenarnya bisa dikatakan untuk surat menyurat tapi karena ada SIPRAJA ada E-BUDDY jadi kita pakai E- BUDDY, terus yang ke dua terkait data penduduk walaupun yang ada di Kabupaten sdgs dan missal ada kemenda ada aplikasi lain terkait elektronik word tapi yang kita utamakan disini adalah atau yang kita pakai adalah SID, karena data SID kita ini yang mendata di setiap wilayah. Jadi Insya Allah untuk kevalidan datanya kita jamin 95% ini aman, karena temen- temen ini langsung turun langsung foto. Jadi saya tunjukan ya disini apa saja ini kan table desa dan masjid, terus tadi kan ini kan mencakup banyak hal ya SID Desa ini ada data penduduk dan lain-lain. Jadi di SID ini yang jadi prioritas kita adalah data penduduk kita”.

Berdasarkan perspektif Martin dan Lubis, efektivitas operasional di Desa Larangan tercapai melalui sinkronisasi alur kerja antara perangkat desa dan institusi pendukung seperti BPD. Konsistensi prosedur ini divalidasi oleh temuan Maharani dan Ulfa (2022) serta Novianti dan Agustina (2024) yang menyimpulkan bahwa standarisasi proses digital merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas administrasi publik. Selain itu, kemudahan navigasi layanan yang disediakan pada website desa sejalan dengan analisis Khirdany dan Anas (2024) mengenai pentingnya aksesibilitas informasi dalam menciptakan interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya menentukan tingkat keberhasilan sistem secara keseluruhan.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Martin dan Lubis (1987) mengenai pendekatan proses dari hasil kualitas pelayanannya sudah sesuai karena alur kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Martin dan Lubis. Pandangan ini menyoroti pentingnya tahapan kerja yang terorganisir untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam sebuah organisasi. Menurut Martin dan Lubis, kualitas layanan dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima, yang sejalan dengan penjelasan bahwa interaksi yang baik antara pemberi dan penerima layanan menentukan mutu layanan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pengumpulan data di Desa Larangan mengikuti prosedur yang terstruktur, termasuk kerjasama antara berbagai pihak seperti BPD dan kepala desa. Prosedur ini mencerminkan pendekatan alur kerja yang diusulkan oleh Martin dan Lubis, di mana setiap tahapan dalam alur kerja diperhatikan untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat. Mutu pelayanan juga berkaitan dengan keahlian teknis petugas dalam mengoperasikan Sistem Informasi Desa (SID), yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari pendekatan alur kerja dalam pengelolaan SDM yang ditekankan oleh Martin dan Lubis.

Pendekatan Sasaran:

Dalam konteks Sistem Informasi Desa (SID), Goals Approach atau Pendekatan Sasaran digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan sistem dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah digariskan, misalnya keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Para ahli berpendapat bahwa pendekatan ini menitikberatkan pada output dan dampak akhir dari program-program yang dijalankan. Efektivitas adalah organisasi dapat diukur melalui realisasi sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti karakteristik organisasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan (Steers 1985). Menurut Martin dan Lubis(1987) bahwa, Pendekatan Sasaran (Goals Approach): Menilai sejauh mana SID mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti transparansi informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berikut hasil

Type your title in here (8 pt)

wawancara mengenai informasi tujuan dan partisipasi masyarakat desa terkait SID dengan bapak Achmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

“yang di manfaatkan masyarakat desa bahkan adek-adek sekalah yang magang data penduduknya itu, terus yang kalau memang mau mengakses kita kasih akses seperti adek-adek yang magang ini untuk artikel bisa , cuman itu tadi beliaunya itu malah malu , kalau dari saya tidak keberatan buat akses untuk rw tiga ataupun rw berapapun untuk update artikel , tetapi karena bapaknya ini malu akhirnya saya tidak memaksa, tetapi beliau masih aktif sampe sekarang , terkait keterlibatan masyarakt y aitu tadi mereka membuat artikel tetapi malu untuk mengakses sendiri, akhirnya mereka kirim ke saya, saya yang submit artikel tersebut di website, dalam artikel itu juga saya cantumkan nama warga yang membuat artikelnya”.

Berikut beberapa bukti artikel yang di upload di website resmi pemerintah desa larangan:

Gambar 2. Gambar 3

Pembuatan Pot Bunga Dari Galon Bekas Oleh PKK RT 10/RW 03 Desa Larangan

11 Desember 2025 93 Kali Dibaca Achmad Solifudin



Sumber; Website Resmi Pemerintah Desa Larangan

Gambar di atas merupakan bukti nyata partisipasi aktif masyarakat dalam memublikasikan kegiatan positif melalui website resmi Desa Larangan. Artikel mengenai pembuatan pot bunga dari galon bekas ini hanyalah salah satu contoh, dan masih banyak dokumentasi kegiatan lainnya yang telah diunggah sebagai bentuk transparansi dan kreativitas warga.

Di Desa Larangan, keberhasilan Sistem Informasi Desa (SID) sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Konsep ini sejalan dengan teori Martin dan Lubis, yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan organisasi. Warga desa memiliki peran sentral dalam SID. Mereka dapat membantu mengidentifikasi masalah, memberikan saran untuk program yang sedang berjalan, dan mendukung pengumpulan data. Keterlibatan aktif ini memastikan data yang dihasilkan akurat dan terbaru. Partisipasi warga dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti mengikuti sosialisasi dan pelatihan SID, memberikan masukan terhadap program, dan terlibat langsung dalam pengumpulan data. Dengan demikian, warga dapat memanfaatkan SID untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berikut hasil wawancara mengenai kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat desa terkait SID dengan Ibu Santi salah satu masyarakat di Desa Larangan, Kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

“kami masyarakat desa larangan sejauh ini cukup puas dengan adanya SID ini di desa kami. Karena apa setelah ada SID masyarakt bisa memantau desanya melalui website ini tadi, dan perangkat desa juga memberi kamu akses, contohnya kalau ada kegiatan di desa kami bisa di upload sendiri di website itu dalam bentuk artikel. Dari saya pribadi karena saya yang mengelolah bank sampah di desa larangan maka setiap ada kegiatan saya selalu konfirmasi ke perangkat desa bahwa saya mengupload hasil kegiatan hari ini. Walaupun ada kendala terkait pemahaman teknologi tetapi perangkat desa selalu membantu kami”.

Keterlibatan warga dalam SID memberikan banyak keuntungan, termasuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, kualitas data dan informasi yang dikumpulkan juga meningkat. Untuk meningkatkan partisipasi warga, pemerintah desa dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi rutin, memanfaatkan teknologi komunikasi seperti aplikasi pesan, dan melibatkan warga dalam pembuatan SID melalui forum diskusi. Namun, beberapa faktor dapat mempengaruhi partisipasi warga, seperti tingkat literasi teknologi, ketersediaan infrastruktur, dan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, Desa Larangan dapat memaksimalkan manfaat SID untuk kemajuan bersama. Adapun informasi dari bapak Achmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo terkait tujuan SID di Desa Larangan, sebagai berikut.

“Jadi begini terkait tujuannya SID apa, ini kita lebih kearah pemutus kebijakan. Karena terkait pelayanan umum itu sudah ada aplikasi untuk pelayanan (surat menyurat) dari Pemda. SID ini lebih kita gunakan untuk pemutus kebijakan saat ini. misal contohnya Perbup tentang BPD (No.47 Tahun 2017) kalau penduduknya 3.000-4.999 itu BPD cuman 5, kalau penduduknya itu 5.000-9.999 penduduk itu jumlahnya 7 kalau di atas 10.000 BPD Jumlahnya 9. Dari situ kita liat jumlah penduduknya totalnya 6rb sekian, jadi bisa diambil kebijakan oleh bapak kepala desa dengan mengacu ketentuan di perbup juga bahwa BPD Larangan total 7 orang. Lalu contoh pemutus kebijakan yang lain yaitu ada data kemiskinan di Aplikasi SID. setelah kasi kesra melakukan pendataan dan kami input di sid. Apabila ada pemetaan terkait terbatasnya jumlah pantun yang diterima maka Desa tinggal mengambil data di SID dan mengklarifikasinya berdasarkan tingkat kemiskinan individu tersebut. Misalnya begini setelah di data oleh kasi kesra ternyata di Desa Larangan itu ada 100 penduduk miskin atau kurang mampu tetapi di lapangan ada bantuan dari Pemda berupa pemberian sembako hanya untuk 25 orang, jadi 100 data dari Pak kasi kesra yang sudah di input di SID kita ambil dan kita klarifikasi siapa sih yang 25 orang ini paling kurang mampu atau miskin yang berhak mendapat bantuan tersebut seperti itu Kirana contoh kebijakan yang bisa diambil Desa karena adanya data yang kita input di SID”.

Efektivitas sistem informasi di Desa Larangan telah memenuhi kriteria keberhasilan berdasarkan pendekatan sasaran (Martin dan Lubis, 1987), di mana target transparansi dan keterlibatan warga berhasil dicapai secara nyata. Fakta bahwa masyarakat aktif berkontribusi dalam publikasi artikel menunjukkan adanya sinergi antara kemampuan adaptasi organisasi desa dengan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan temuan Maharani & Ulfa (2022), Novianti & Agustina (2024), serta Khirdany & Anas (2024) yang secara kolektif menegaskan bahwa efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dan kemampuan platform dalam menyediakan layanan informasi yang transparan serta akuntabel. Dengan demikian, keterlibatan warga menjadi indikator kunci bahwa SID bukan hanya sekadar formalitas teknologi, melainkan instrumen pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai hasil wawancara yang menjelaskan UU No 47 tahun 2017 mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta operasional pembangunan desa. Jadi, keberhasilan sistem informasi di Desa Larangan secara yuridis didukung oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (khususnya Pasal 86) yang mengamanatkan ketersediaan data dan informasi desa, serta PP No. 47 Tahun 2015 sebagai dasar operasional pembangunan yang mengedepankan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Martin dan Lubis (1987) mengenai pendekatan sasaran dari hasil keberhasilan system informasi desa serta partisipasi dari mayarakat sudah sesuai karena keberhasilan sistem dalam mencapai target yang telah ditetapkan, seperti transparansi informasi dan keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Martin dan Lubis (1987) bahwa efektivitas diukur melalui tercapainya target yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif warga

Type your title in here (8 pt)

sangat krusial untuk kesuksesan SID. Warga terlibat dalam pengumpulan data dan memberikan saran, yang mendukung tercapainya tujuan transparansi dan partisipasi. Keterlibatan ini mencerminkan prinsip-prinsip dari pendekatan fokus pada tujuan, di mana hasil dan dampak akhir dari program menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari pendekatan fokus pada tujuan dalam manajemen, sebagaimana dijelaskan oleh Martin dan Lubis, yang menekankan pentingnya pencapaian target organisasi melalui keterlibatan warga.

V. SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintahan Desa Larangan ditentukan oleh tiga dimensi utama: pendekatan sumber daya, yang menekankan optimalisasi manajemen sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keakuratan data. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi informasi di tingkat desa tidak hanya bergantung pada perangkat keras, tetapi lebih kepada kualitas modal manusia. Pendekatan proses, yang menyoroti alur kerja terstruktur dan keahlian teknis staf dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Dalam konteks SID Desa Larangan, temuan menunjukkan bahwa efektivitas tercapai karena adanya mekanisme kerja yang terstruktur. Pendekatan tujuan, yang berfokus pada pencapaian transparansi, partisipasi masyarakat, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Implikasi: Temuan ini menyiratkan bahwa memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan literasi digital, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat merupakan strategi esensial untuk meningkatkan keberlanjutan dan inklusivitas SID dalam mendukung tata kelola desa. Batasan: Namun, studi ini terbatas pada konteks satu desa dan bergantung pada data kualitatif, yang dapat membatasi generalisasi hasil ke konteks yang lebih luas. Penelitian Masa Depan: Disarankan untuk melakukan studi lanjutan dengan menggunakan analisis komparatif dan kuantitatif di beberapa desa untuk mengukur kinerja sistem secara lebih komprehensif dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di konteks regional lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga terutama orang tua saya atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penelitian. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan.

REFERENSI

- [1] R. D. Novianti and I. F. Agustina, "Sistem Informasi Desa (SID) dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Desa," *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, vol. 25, no. 1, pp. 1–12, 2024, doi: 10.21070/jjppr.v25i1.1367.
- [2] Hendra Maulana et al., "Desain Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Pandean, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Penelitian Sistem Informasi*, vol. 1, no. 2, pp. 28–48, 2023, doi: 10.54066/jpsi.v1i2.472.
- [3] G. A. Hidayat Gigih, M. R. Maulani, and D. Hamidin, "3097-Text Article-6162-1-10- 20230830," *Teknologi Informasi*, vol. 15, no. Vol. 15 No. 2, pp. 71–77, 2023.
- [4] N. M. H. Saputra, D. B. Srisulistiowati, and H. Kusmara, "Desain Sistem Informasi Administrasi," *J.Keamanan Informasi*, vol. 3, no. 2, pp. 203–214, 2023, doi: 10.31599/jiforty.v3i2.1257.
- [5] Ismai, "Desain Website sebagai Media Promosi dan Informasi," *J. Inform. Pelita Nusantara*, vol. 3, no. 1, pp. 82–86, 2018.
- [6] M. Pradana, "Perencanaan Skema Sistem Informasi untuk Kegiatan Manajemen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis EKOMBIS*, vol. 4, no. 1, pp. 65–71, 2016, doi: 10.37676/ekombis.v4i1.155.
- [7] H. Maharani and M. Ulfa, "Sistem Informasi Desa dalam Peningkatan Layanan Publik Berbasis Web dan Mobile," *J. Inf. and Technol.*, vol. 4, no. 3, pp. 136–141, 2022, doi: 10.37034/jidt.v4i3.212.
- [8] D. Bender, "DESA - Optimasi Model Modelica Berstruktur Variabel Menggunakan Anotasi Kustom," *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, vol. 18-April-2, no. 1, pp. 45–54, 2016, doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [9] P. R. Situmorang and Y. A. Lubis, "Peran Konsultasi Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi," vol. 6, no. September, pp. 168–175, 2024, doi: 10.31289/strukturasi.v6i2.4462.
- [10] J. A. Negara, "Transparansi Informasi Publik di Desa Sawala," vol. 4039, no. June, pp. 18– 34, 2025.

- [11] R. D. R. Khoirunnisa and E. Haryati, "Efektivitas Pengawasan dalam Pengolahan Limbah Medis yang Dikategorikan sebagai Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Provinsi Jawa Timur," *Fakultas Ilmu Administrasi, Dr. Soetomo Surabaya Email: dwirizkyrahmadhanikn@gmail.com A. LATAR BELAKANG Pengembangan p.*, SARR (Soetomo Adm. Reform Rev)., vol. 1, no. 5, pp. 865–878, 2022.
- [12] I. I. OCTAVIA and D. SUPROBOWATI, "Implementasi Sistem Informasi Desa dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Desa di Kecamatan Kapatihan, Kabupaten Menganti," *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, vol. 3, no. 3, pp. 75–86, 2024, doi: 10.38156/jisp.v3i3.213.
- [13] A. D. Rahayu, H. Lestari, and D. Rostyaningsih, "Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal," *J. Public Policy ...*, vol. 10, no. 4, pp. 113 129, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32123>
- [14] A. L. B. Masalah, "Agasi Anwar, 2014 Kinerja Kepala Desa dalam Meningkatkan Layanan Birokrasi di Desa Cikaum Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Indonesia Universitas Pendidikan | repositori.upi.edu | perpustakaan.upi.edu," 2014.
- [15] F. Z. Zebua, A. B. Ndraha, and Y. Telaumbanua, "Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Orahili Tumori," *J. EMBA*, vol. 10, no. 4, pp. 1410– 1416, 2022.
- [16] R. Hughes, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kecamatan Pulau, Kabupaten Bangkinang, Kabupaten Kampar," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, p. 287, 2008.
- [17] K. L. MOGOT, F. TULUSAN, and V. LONDA, "Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Usaha Kecil di Desa Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Manado City," *J. Adm. Public*, vol. 9, no. 4, pp. 170–176, 2023, doi: 10.35797/jap.v9i4.49812.
- [18] A. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, "TUNIKOM_Fajri," *Prosiding Konferensi Dokumentasi Sejarah Media.*, pp. 7–8, 2014.
- [19] J. I. J. D. Gibson JIL, "Organisasi, diterjemahkan oleh Agus Dharma," Jakarta: Erlangga, p. 120, 2001. "A 'layman's' explanation of Ultra Narrow Band technology," Oct. 3, 2003. [Online]. Available: <http://www.vmsk.org/Layman.pdf>. [Accessed: Dec. 3, 2003].
- [20] D. Hartanti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Layanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjung Pinang," pp. 1–120, 2013.
- [21] D. Ririn Indriastuti, "Efektivitas Organisasi," *J. Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 12, no. 1, pp. 22–36, 2022.
- [22] C. V. Manafe, "Soda Molek: Efektivitas Layanan Publik di Desa Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang," *Jurnal Inovasi Kebijakan.*, vol. 4, no. 2, pp. 17–29, 2019, doi: 10.37182/jik.v2i4.39.
- [23] S. A. Putri and D. N. A. Rahmanto, "Analisis Efektivitas Penggunaan Kode Respons Cepat Standar Indonesia (QRIS) sebagai Alat Pembayaran Non-Tunai di Bank Syariah Indonesia KCP Godean 2," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 456–476, 2023, doi: 10.47467/elmal.v5i1.427.
- [24] A. M. Parhizgari and G. R. Gilbert, "Ukuran efektivitas organisasi: Kinerja sektor swasta dan publik," *Omega*, vol. 32, no. 3, pp. 221–229, 2004, doi: 10.1016/j.omega.2003.11.002.
- [25] T. V. Erdina and D. Hariani, "Analisis Efektivitas Organisasi dalam Program Layanan Administrasi Terpadu," *J. Manajemen Kebijakan Publik. Rev.*, vol. 6, no. 3, 2017, [Online]. Available: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- [26] Asichul In'am, Moh. Ifanirul Akhya Rudian, and Bisma Dwi Apriyadi, "Model dan Pendekatan untuk Efektivitas Organisasi," *Cermin J. Manaj. dan Pendidik. Berbas. Islam Nusantara.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–7, 2023.
- [27] A. Saputri, Lukman, and A. Uceng, "Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Desa Bulu," *Jurnal Studi Politik Lokal dan Pembangunan.*, vol. 10, no. 3, pp. 67–68, 2024.
- [28] A. Adamuddin and A. Yamin, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Sistem Informasi terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat," *JIIP - Jurnal Ilmu Pendidikan.*, vol. 8, no. 5, pp. 5096–5108, 2025, doi: 10.54371/jiip.v8i5.7885.
- [29] D. Safitri and M. Adnan, "Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Layanan Mandiri pada Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Marunggi, Kabupaten Piaman Selatan," vol. 06, no. 01, pp. 1–21, 2024, [Online]. Available: <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/indexPrefix10.47134>
- [30] Afriani, "Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar: Tesis," 2024,
- [31] N. Pasaribu, B. Purba, S. Ujung, G. B. Sembiring, and M. Sitorus, "Kebijakan Ekonomi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan," *J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 2, pp. 3895– 3910, 2025.
- [32] M. Q. Nizwa and R. Iskandar, "Tantangan Literasi Digital yang Dihadapi oleh Lansia di Tengah Transformasi Digital," *J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 6, pp. 330–334, 2025
- [33] A. R. M. A. Cahaya Suksma, "Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi," *J. Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi.*, vol. 3, no. 2, pp. 44–54, 2024.
- [34] F. Sistem, I. Desa, and S. Media, "Sistem Informasi Desa (SID) sebagai Media Publikasi".

Type your title in here (8 pt)

- [35] M. B. Rohza, “Tantangan yang Dihadapi oleh Populasi Lansia di Era Masyarakat 5.0 di Indonesia,” Univ, Proklamasi 45 Yogyakarta, pp. 5–6, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.